

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Anggraini, A.M. Tri, 2003, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Hansen, Knud, et al., 2002, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition*, Katalis, Jakarta.

Lubis, Andi Fahmi et.al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan *Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH*, Jakarta.

Sirait, Ningrum Natasya, 2011, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Medan.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2000, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 10, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Makalah/Bahan Kuliah:

Sumardjono, Maria SW. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Jakarta

C. Internet:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, KPPU Putuskan Perkara Importasi Bawang Putih, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2014/03/kppu-putuskan-perkara-importasi-bawang-putih/>, diakses pada tanggal 24 November 2014.

D. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/SR.220/3/2013 tentang Pemasukan Produk Bawang Putih ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Pokok, Fungsi, Dan Kewenangan Ketua/Wakil Ketua Komisi, Anggota Komisi, Dan Sekretariat Komisi Dalam Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Putusan:

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 perihal Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Importasi Bawang Putih, 20 Maret 2014.